

# Analisis Implementasi Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Di Kelurahan Grogol Tahun 2022

Yurisman Star<sup>a1\*</sup>, Krishantoro<sup>b2</sup>, Sribima Raja Sakti<sup>c3</sup>

<sup>a,b,c</sup> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

e-mail : <sup>1</sup>star1\_bintang@yahoo.co.id

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

*Keywords :*  
*Implementation of Public Infrastructure and Facilities Management*

## ABSTRACT

*The background of the problems was related to the performance carried out by PPSU (Public Infrastructure and Facilities Management) employees. There were still many external and internal problems in managing the Management of Public Infrastructure and Facilities. At the external level, one of the problems faced by PPSU employees was the need for more public awareness regarding environmental cleanliness, which often added to the work done by PPSU employees. This study aimed to identify and analyze the implementation of Public Infrastructure and Facilities Management in Grogol Urban Village in 2022, to find out and analyze the inhibiting factors in implementing the Management of Public Infrastructure and Facilities in Grogol Urban Village in 2022, and to know and analyze the efforts made to overcome obstacles to the implementation of Public Infrastructure and Facilities Management in Grogol Urban Village in 2022. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. In-depth interviews were conducted with seven informants. Source triangulation was used to check the validity of the data. The study results showed that implementing of Public Infrastructure and Facilities Management in the Grogol Urban Village in 2022 was quite good. However, in its implementation, it was not enough to say it was good enough because there were several SOPs that some PPSU employees have not understood. Therefore, PPSU officers must improve their skills and expertise to manage the Public Infrastructure and Facilities Management related to the work demands.*

## PENDAHULUAN

Pekerja penanganan prasarana dan sarana umum tingkat Kelurahan (yang selanjutnya disingkat PPSU) adalah pekerja yang melakukan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK). Kehadiran komponen PPSU dalam perangkat kelurahan dinilai penting dalam menjaga kelancaran operasional perangkat pendukung kota dan keindahan wilayah demi kenyamanan masyarakat kota Jakarta. Tugas tugas penting yang diemban oleh pegawai PPSU tersebut meliputi perawatan lampu jalan, menjaga kebersihan jalan umum, saluran, merawat fasilitas umum dan sosial di sekitar wilayah terutama di Kelurahan yang menjadi wilayah tugas pegawai PPSU tersebut, hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 Pasal 4 tentang ruang lingkup tugas pegawai Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (BPK RI, 2017). Tugas – tugas tersebut menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh pegawai PPSU dengan arahan pimpinan yang di koordinasikan oleh koordinator lapangan (korlap). Dalam kinerja yang dilakukan oleh pegawai PPSU, masih dapat ditemukan banyak permasalahan eksternal dan internal yang dalam upaya mengelola penanganan prasarana dan sarana umum di Kelurahan. Pada tingkat eksternal, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pegawai PPSU antara lain yaitu; kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan yang kerap menambah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai PPSU. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya yang berdampak pada memburuknya situasi lingkungan wilayah yang ditangani oleh pegawai PPSU tersebut, (Karolyn, 2021).

## KAJIAN PUSTAKA

### Implementasi

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Kajian implementasi merupakan suatu proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksana dari kebijakan yang telah dibuat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Eugene yang dikutip Agustino (2016: 153) mengungkapkan kerumitan dalam proses implementasi sebagai berikut: "Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan- slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang". Hakekat dan implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* yang diterbitkan pada tahun 1983 yang dikutip Agustino (2016: 153) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: "Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya". Grindle dalam Winarno (2016:135) "implementasi dengan mengatakan secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah". Van Meter dan Van Horn yang dikutip Agustino, (2016: 153) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai berikut: "*Policy implementation encompasses those action by public and private individuals (and group) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*" (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Sementara Grindle yang dikutip oleh Agustino, (2016: 153) merumuskan definisi yang berbeda dari beberapa definisi-definisi diatas, memandang implementasi sebagai berikut: "Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksana program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai".

### METODE PENELITIAN

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong (2014:157) yang menyatakan pendapatnya bahwa penelitain kualitatif adalah : "...Penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki". Sedangkan definisi pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2017:9) mengemukakan bahwa: "...Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulai (gabungan)". Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah yaitu objek yang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti memasuki objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. Sedangkan menurut Satori dan Aan (2010:22) menjelaskan bahwa "...Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati". Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian

yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang di kaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Implementasi Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Di Kelurahan Grogol Tahun 2022.”**

Upaya mengelola penanganan prasarana dan sarana umum bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja secara efektif dan efisien atas pengelolaan penanganan prasarana dan sarana umum menjadi lebih baik dan bersih sehingga dapat terlihat lingkungan yang asri dan nyaman. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dimulai dari keberhasilan masing-masing petugas PPSU yang bersangkutan. Keberhasilan kerja petugas PPSU tentunya di dukung oleh kerja tim work yang baik dan terjalin kerjasama yang baik serta adanya komunikasi yang berkesinambungan.

Merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program kerja yang dilakukan oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Implementasi Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum petugas penanganan prasarana dan sarana umum di Kelurahan Grogol Tahun 2022 merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai. Implementasi Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum merupakan pencapaian atas kerja yang telah dilakukan dan dilaksanakan, Implementasi Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum kerja petugas penanganan prasarana dan sarana umum, sejauh mana Implementasi Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum hasil kerja yang telah dilakukan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pengelolaan penanganan prasarana dan sarana umum.

#### **Hambatan yang dialami dalam Implementasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber sebagai key informan terdapat beberapa hambatan petugas PPSU seperti :

1. Masih rendahnya keterampilan dan keahlian yang di miliki oleh petugas PPSU dalam upaya mengelola penanganan prasarana dan sarana umum sesuai dengan tuntutan kerja
2. Masih rendahnya kemampuan untuk beradaptasi dengan tim dalam menghadapi perubahan kerja
3. Terdapat kurangnya terjalin kerjasama antar petugas PPSU sehingga tidak tercapainya tujuan dan sasaran organisasi
4. Terdapat kurangnya disiplin kerja sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan yang sedang dilakukan

#### **Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan**

1. Meningkatkan keterampilan dan keahlian yang di miliki oleh petugas PPSU dalam upaya mengelola penanganan prasarana dan sarana umum sesuai dengan tuntutan kerja
2. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan tim dalam menghadapi perubahan kerja
3. Meningkatkan terjalinnya kerjasama antar petugas PPSU sehingga tidak tercapainya tujuan dan sasaran organisasi

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Analisis Implementasi Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Di Kelurahan Grogol Tahun 2022 masih terbelang belum maksimal, jika dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal ini didukung oleh data tabel Jumlah Pegawai PPSU di Kelurahan Grogol, menunjukkan bahwa jumlah sumber daya pegawai sebagai lebih sedikit, Hambatan atas Implementasi Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Di Kelurahan Grogol Tahun 2022, yakni Rendahnya keterampilan dan keahlian yang di miliki oleh petugas PPSU dalam upaya mengelola, penanganan prasarana dan sarana umum sesuai dengan tuntutan kerja; Rendahnya kemampuan untuk berstruktur birokrasi dengan tim dalam menghadapi perubahan kerja; Kurangnya terjalin kerjasama antar petugas PPSU sehingga tidak tercapainya tujuan dan sasaran organisasi; kurangnya disiplin kerja sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan yang sedang dilakukan. Upaya dalam mengatasi hambatan atas Implementasi Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Di Kelurahan Grogol Tahun 2022, yakni meningkatkan keterampilan dan keahlian yang di miliki oleh petugas PPSU dalam upaya mengelola

penanganan prasarana dan sarana umum sesuai dengan tuntutan kerja, meningkatkan kemampuan untuk berstruktur birokrasi dengan tim dalam menghadapi perubahan kerja, meningkatkan terjalannya kerjasama antar petugas PPSU sehingga tidak tercapainya tujuan dan sasaran organisasi, meningkatkan disiplin kerja sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan yang sedang dilakukan

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Ardianto. 2016. Metode Penelitian Untuk Public Relation. Bandung Simbiosia.
- [2]. Baker. 2013. Tindak Kekerasan Anak Mengintai Anak Jalanan Jatim: Surabaya: Lutfansah Mediatama
- [3]. Burhan Bungin. 2016 Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [4]. Dimock dan Dimock yang dikutip oleh Anggara. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung CV Pustaka Stia.
- [5]. Dunn, 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Gajah Mada University Press. Eugene yang dikutip Agustino. 2016 Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [6]. Grindle dalam Winarno. 2016. Kebijakan Publik (teori dan proses) Jakarta: Media Pressindo.
- [7]. Guba dan Lincoln (1998) yang dikutip Yati Afiyanti. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Riset Keperawatan. Jakarta Rajawali Press.
- [8]. Handyaningrat, Soewarno. 2014. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- [9]. Herbert A. Simon sebagaimana dikutip oleh Dann Suganda. 2011 Administrasi Strategi, Taktik dan Teknik Penciptaan Efisiensi. Jakarta : Intermedia
- [10]. Moleong J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Nasution. 2015. Metode penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung Tarsito.
- [11]. Nugroho, 2014. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Gramedia
- [12]. Ripley dan Franklin dalam Joko, W, 2016. Good Governance, telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, pada era Desentralisasi dan Otonomi daerah. Surabaya : Insan Cendekia.
- [13]. Rivai, 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dan Teori Ke Praktik. Edisi Pertama. Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- [14]. Said Zainal Abidin (Abidin, 2014. Kebijakan Publik, Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- [15]. Sarwono dalam Budihardjo, 2017. Panduan Praktis Penilaian Kinerja Karyawan . Jakarta Raih Asa Sukes.
- [16]. Siagian, 2017. Filsafat Administrasi, Jakarta: Rineka Cipta
- [17]. Soekanto Soerjono, 2016. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta Rajawali Pers.
- [18]. Sofwan Badri, 2017. Konsep-Konsep Dasar Administrasi, Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan
- [19]. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta
- [20]. Bandung
- [21]. Edward III dalam Tangkilan, Hessel Nogi S., 2013. Manajemen Publik. Jakarta PT Gramedia Widiasarana.
- [22]. Thoha dalam Anggara. 2016. Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- [23]. Thomas. 2016. The social Construction of reality. Unites States : Anchor Book.
- [24]. Van Meter dan Van Horn yang dikutip Agustino, 2016. Dasar-dasar kebijakan Publik. Alfabeta Bandung.
- [25]. Coogan, P. F., Wise, L. A, O'Connor, G.T, Brown, T.A, Palmer, J.R and Rosenberg, (2017), 'Abuse during childhood and adolescence and risk of adult-onset asthma in African American women', J Allergy Clin Immunol Volume 131, Number 4.
- [26]. Masriani (2017) Jurnal FISIP Volume 4 No 2 tentang Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Anak- anak Pengemis Di Kec. Mandau
- [27]. Riza Alkhafidh (2017) Jurnal Ilmu pemerintahan Volume 5 Nomor 3 tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kota Tana Paser Kabupaten Paser.
- [28]. Satriawan (2017) Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik Volume 3 No 1. Tetang Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar

[29].Shelma Janu Mahartiwi (2016) Jurnal tanpa volume dan nomor tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang